



Ketersediaan Data dan Alur Data Sektoral

MDGs

Millennium Development Goals

Tujuan Pembangunan Milenium



1

Menanggulangi Kemiskinan
dan Kelaparan Ekstrem



2

Mencapai pendidikan Dasar
Untuk Semua



3

Mendorong Kestaraan Gender dan
pembdayaan Perempuan



4

Menurunkan Angka Kematian Anak



5

Meningkatkan Kesehatan Ibu



6

Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan
Penyakit Menular Lainnya



7

Memastikan Kelestarian
Lingkungan Hidup



8

Mengembangkan Kemitraan Global
untuk pembangunan



KATA PENGANTAR

Publikasi buku **Paket-B: Ketersediaan Data dan Alur Data Sektoral** ini merupakan seri kedua dari lima buku paket pemasaran (Paket-A sampai dengan Paket-E) yang disusun dari hasil kegiatan Proyek kerjasama BPS dengan UNICEF tahun 2006 – 2010 di lima kabupaten uji coba, yaitu Kabupaten Bone, Bantaeng dan Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak khususnya pada penyelenggara pemasaran di setiap kabupaten/kota agar dapat memahami data dan informasi yang dihasilkan di setiap tujuan dan target MDGs serta manfaatnya untuk pembangunan kabupaten/kota.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan ringkasan dari lima seri buku publikasi MDGs yaitu buku-1, 2, 3, 7, dan 9 yang telah diterbitkan BPS bekerja sama dengan UNICEF tahun 2006-2010. Buku ini menjelaskan pengertian tentang tata cara mengidentifikasi indikator yang dibutuhkan di kabupaten/kota, metode pengumpulan data dan teknik sampling, mengidentifikasi ketersediaan data di setiap SKPD dan alur pelaporan datanya, khususnya di era desentralisasi sekarang ini.

Kepada tim penyusun di bawah koordinasi saudara Slamet Mukeno yang telah berhasil menyusun buku paket-B ini, disampaikan ucapan terima kasih. Kepada UNICEF dan CIDA yang telah memberikan dukungan dana dan semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaannya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Saran dan kritik membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2009
Kepala Badan Pusat Statistik,

DR. Rusman Heriawan.

<http://www.bps.go.id>

Ketersediaan Data dan Alur Data Sektoral

A. KETERSEDIAAN DATA

Sampai sejauh mana program pembangunan yang sudah berjalan dapat dipantau dari data dan indikator pembangunan yang ada?

Upaya pemantauan dan evaluasi keberhasilan terhadap tujuan pembangunan telah banyak dilakukan oleh pusat yang terlihat antara lain dari adanya lampiran daftar indikator kinerja pada Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Indikator tersebut dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Apakah tujuan pembangunan milenium (MDGs) sejalan dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah?

Tujuan pembangunan milenium ternyata sejalan dengan program pembangunan sosial yang dicanangkan pemerintah Indonesia terutama pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJM dan program pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Sehingga pemahaman tentang MDGs perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk penyusunan indikator pembangunan?

Berbagai upaya kegiatan pengumpulan data untuk menyusun indikator pembangunan dilakukan melalui sensus, survei, dan sistem pelaporan. Menurut Undang-Undang Statistik No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, tugas mengumpulkan data dasar yang umumnya melalui sensus dan survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan tugas pengumpulan data sektoral melalui sistem pelaporan umumnya dilakukan oleh departemen sektor.

Sejauh mana upaya-upaya kegiatan pengumpulan data dalam menghasilkan indikator pembangunan?

- Melakukan studi untuk membuat peta upaya pemantauan dan evaluasi program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, serta globalisasi,

- Melakukan upaya pendekatan kepada sumber data yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi program-program tersebut, dan
- Mengidentifikasi proksi indikator pencapaian tujuan pembangunan yang sesuai dengan indikator MDGs.

Bagaimana peta upaya yang telah dibuat untuk memantau dan mengevaluasi program pembangunan millennium dan upaya menyediakan data?

Peta upaya untuk memantau dan mengevaluasi program pembangunan millenium yang meliputi bidang kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, dan globalisasi dapat dilihat dari data dan indikator dari departemen atau instansi terkait pada tingkat pusat

Data dan indikator serta upaya ketersediaan datanya tersebut dirinci berdasarkan tujuan dan instansi yang melakukan sebagai berikut :

Tujuan I : memberantas kemiskinan dan kelaparan

Departemen Sosial

Untuk mendata siapa dan dimana yang menjadi sasaran program bantuan fakir miskin diserahkan kepada instansi daerah melalui petugas sosial kecamatan. Pendataan yang pernah dilakukan Depsos, antara lain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Badan Pusat Statistik (BPS)

Melakukan kegiatan pengumpulan data melalui Susenas untuk melihat tingkat kemiskinan penduduk yang didekati melalui indikator pengeluaran dan konsumsi rumah tangga yang sudah dimulai sejak tahun 1963.

Pada tahun 1984, angka kemiskinan untuk beberapa tahun sekaligus dihitung oleh BPS, yaitu yang berasal dari Susenas 1976–1981. Sejak itu penghitungan tingkat kemiskinan terus dilakukan setiap tiga tahun sekali mengikuti periodisitas dilakukannya Modul Konsumsi Susenas, salah satu modul dalam Susenas. Dari data konsumsi ini dapat pula diperkirakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dengan menghitung banyaknya asupan energi yang dikonsumsi. Dengan patokan minimum 2100 kalori asupan energi per hari, dapat dihitung jumlah penduduk yang kelaparan.

Indikator lain untuk mengukur kelaparan adalah status gizi balita. Survei Garam Yodium (SGY) dan Modul Kesehatan Susenas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), dan Survei Kesehatan Rumah Tangga sebagai bagian dari Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas)

Untuk mengetahui rumah tangga (rt) yang miskin beserta alamatnya dilakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan dalam rangka pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai subsidi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun 2005

BKKBN

Akibat keterbatasan data makro untuk menentukan target program pemberantasan kemiskinan yang mensyaratkan data tentang siapa yang miskin, dan dimana tempat tinggalnya, maka BKKBN mengumpulkan beberapa komponen kesejahteraan keluarga dalam rangka menutupi keterbatasan data makro tersebut yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Dengan adanya pendataan ini maka kelompok sasaran intervensi program pemberantasan kemiskinan dapat diidentifikasi.

Tujuan 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua

Departemen Pendidikan Nasional

Telah dirintis suatu sistem pendataan informasi statistik, disingkat dengan SIS pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi melalui pendekatan sekolah. Data dasar pendidikan untuk menyusun indikator angka partisipasi sekolah oleh Depdiknas dikumpulkan dari sekolah-sekolah umum kemudian dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Data diringkas dan dikirim ke dinas provinsi dan pusat.

Departemen Agama

Sistem pendataan informasi statistik pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi dipakai juga di Depag yang biasa menyebutnya sebagai sistem manajemen informasi pendidikan atau *Education Information System (EMIS)*.

BPS

Melalui Survei terutama Kor Susenas telah dikumpulkan data mengenai pendidikan yang sedang dijalani maupun pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk.

Tujuan 3: Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

BPS

Data tentang ketenagakerjaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu survei angkatan kerja nasional (Sakernas) untuk tingkat nasional dan provinsi dan juga Susenas untuk tingkat kabupaten.

Akan tetapi sejak tahun 2006, indikator ketenagakerjaan sampai tingkat kabupaten yang disajikan hanya berasal dari data Sakernas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Catatan administrasi dari institusi legislatif, disarankan sebagai sumber data untuk menyusun indikator kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor publik (Bappenas, 2004).

Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Data pejabat pada eselon yang tinggi, seperti direktur (eselon 2) ke atas yang dapat diperoleh dari BKN, sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan menyusun indikator kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) bersama BPS

Dalam upaya memantau kesetaraan gender di daerah, KPP telah melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index (GDI)* untuk tingkat kabupaten/kota pada tahun 2002. IPG adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang sudah dikoreksi dengan kesenjangan gender. Seperti pada penghitungan IPM, tiga komponen yang digunakan pada penghitungan IPG adalah akses pada pelayanan pendidikan dasar, akses pelayanan kesehatan, dan perbaikan daya beli masyarakat. Indikator yang dapat diperoleh dari BPS (dari Susenas), meliputi angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Sementara itu data untuk menghitung angka harapan hidup diperoleh dari Sensus Penduduk (SP2000).

Tujuan 4: Menurunkan angka kematian anak

Belum baiknya catatan administrasi tentang kematian anak, maka penghitungan angka kematian anak dilakukan dengan metode penghitungan tidak langsung.

BPS

Perkiraan angka kematian anak meliputi angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (Akaba), Sumber data yang dapat dipakai adalah Sensus Penduduk (SP), Kor Susenas, dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).

Di samping itu dari survei yang dilakukan BPS bersama BKKBN, dan Depkes, yaitu Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) juga dapat digunakan untuk menghitung AKB dan Akaba.

Depkes

Profil Kesehatan Indonesia merupakan sumber data yang lengkap yang pengumpulan datanya dilakukan melalui catatan administrasi yang diperoleh secara berjenjang dari Puskesmas. Di tingkat pusat data ini digabungkan dengan data dari unit lain di Depkes yang diperoleh dari rumah sakit pemerintah dan swasta. Jenis data yang dikumpulkan dari sumber ini antara lain penyakit, kematian, dan pelayanan kesehatan seperti imunisasi.

Tujuan 5: Meningkatkan kesehatan ibu

Upaya menghitung indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas untuk memantau kesehatan ibu tidak mudah dilakukan.

BPS

Sumber data untuk menghitung AKI yang penghitungannya melalui dua pendekatan yaitu secara langsung dan tidak langsung diantaranya metode sisterhood adalah Susenas Modul Kesehatan, Supas, dan SDKI. Sumber data ini hanya mampu menghasilkan indikator tingkat provinsi. Ada sumber data lain yaitu Surkesnas (Depkes), namun hanya menghasilkan indikator tingkat kawasan.

Depkes

Salah satu data dari Depkes yang bisa digunakan adalah Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, yang uji cobanya telah dilakukan pada tahun 2006. Akan tetapi karena kehamilan dan kematian ibu merupakan kejadiannya sangat langka sehingga menghasilkan angka yang dianggap tidak akurat. Oleh karena itu, di samping indikator persalinan dengan pertolongan tenaga medis, beberapa indikator yang mudah diperoleh, seperti status gizi ibu atau anemia wanita atau ibu hamil dapat pula diusulkan untuk dijadikan indikator proksi. Sumber data untuk menghitung

angka persalinan oleh tenaga medis adalah Kor Susenas dan sumber data untuk menghitung status gizi ibu adalah SGY. Kedua sumber data tersebut dapat menghasilkan indikator untuk tingkat kabupaten/kota.

Selama ini data tentang adanya anemia pada ibu hamil dicatat oleh petugas di Puskesmas, sehingga indikator prevalensi ibu hamil yang menderita anemia dapat dihasilkan pada tingkat kecamatan. Walaupun demikian masalah rendahnya cakupan pencatatan juga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

Depkes

Data tentang penyakit menular disajikan dalam Profil Kesehatan Indonesia yang memuat jumlah kasus dan kematian karena penyakit malaria dan beberapa macam penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC. Data ini berasal dari laporan seluruh Puskesmas yang berada di wilayah kantor dinas kesehatan kabupaten/kota yang kemudian diolah dan diteruskan ke provinsi dan pusat. Masalah utama yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman sehingga *time-lag* antara tahun rujukan data dan tahun penerbitan publikasi menjadi lebih besar jika dibandingkan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah.

BPS dan BKKBN.

Belum meratanya pendeteksian, data HIV/AIDS sebagai salah satu penyakit menular masih sulit diperoleh. Secara umum data tentang penyakit menular hanya merupakan catatan administrasi. Dengan demikian, indikator penyakit menular yang memungkinkan datanya tersedia hanya berupa proksi, misalnya malaria yang diidentifikasi dengan rumah tangga yang tidur menggunakan kelambu. Sedangkan yang tersedia hanya angka prevalensi KB (dengan kondom).

Tujuan 7: Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup

Indikator untuk mengukur pencapaian Target 9 ada yang terlalu teknis, sehingga hanya instansi tertentu yang dapat menyediakan datanya. Indikator tersebut adalah emisi CO₂, dan ada yang hanya dapat diperoleh dari catatan administrasi, seperti luas lahan.

BPS

Indikator tentang kawasan lahan kritis dan hutan lindung disajikan dalam Podes (Statistik Potensi Desa), data itu diperoleh dari dinas kehutanan berdasarkan keterangan dari kepala desa atau lurah. Sementara itu indikator air minum dan sanitasi diperoleh dari Modul Perumahan Susenas.

Departemen Kehutanan (Dephut)

Di tingkat kabupaten, data tentang lingkungan hidup seperti pergeseran luas lahan kritis dan hutan lindung dikumpulkan secara rutin oleh unit kerja yang ada di lingkup Pemda. Data ini dikumpulkan oleh dinas kehutanan daerah dan secara berjenjang dikirimkan ke Dephut. Senada dengan departemen lain keluhan yang dikemukakan oleh dephut adalah masalah keterlambatan laporan dari daerah.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH)

Data tentang pencemaran diupayakan untuk dikumpulkan dari instansi yang menangani lingkungan hidup di tingkat daerah dan dikirim ke pusat. Hanya tidak semua daerah sudah dapat mencatat pencemaran udara, tidak seperti pencemaran air, karena biasanya hanya di beberapa kota besar saja tersedia alat yang mengukur pencemaran udara.

Ada tiga indikator lain yang diusulkan Bappenas untuk mengukur pelestarian lingkungan hidup, yaitu konsumsi energi per kapita, konsumsi zat perusak ozon, dan konsumsi kayu untuk memasak. Dari tiga indikator tersebut hanya data konsumsi kayu untuk memasak yang dihasilkan oleh BPS melalui Modul Perumahan Susenas.

Tujuan 8: Mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan

Dari beberapa target yang ditetapkan dalam upaya pencapaian tujuan 8, hanya tiga target yang terakhir yaitu target 16 (menyangkut ketenagakerjaan), target 17 (pemenuhan kebutuhan obat yang esensial), dan target 18 (akses terhadap teknologi baru) yang dapat diupayakan proksi indikatornya.

BPS

Beberapa indikator dari Kor Susenas dapat diarahkan untuk mengukur indikator proksi pencapaian MDGs. Untuk memperoleh indikator angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun (target 16), beberapa sumber data ketenagakerjaan yang penting dapat diperoleh dari Sakernas yang dapat menghasilkan indikator sampai tingkat kabupaten.

Untuk mencapai target 17, ada beberapa sumber data yang dapat digunakan misalnya bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk menyediakan akses terhadap obat yang terjangkau, untuk memperoleh indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap obat-obatan esensial yang terjangkau dan berkelanjutan yang proksi-nya dapat diperoleh dari Susenas kor; sedangkan indikator proksi pengeluaran rumah tangga untuk obat-obatan dapat disediakan melalui Modul Kesehatan Susenas dan SDKI.

Target 18: Ada dua komponen sumber data yang dipakai untuk menghitung dua indikator yaitu pelanggan telepon per 1000 penduduk, dan penggunaan komputer personal per 100 penduduk untuk memenuhi target 18. Sumber data yang pertama adalah penggunaan telepon dan komputer dalam rumah tangga dan yang ke dua adalah di luar rumah tangga.

Data Susenas kor hanya dapat dimanfaatkan sebagai proksi indikator, oleh karena itu dalam penyediaan data diperlukan kerja sama dengan pihak swasta.

Bagaimana upaya penguatan data dan pemantauan pembangunan milenium di tingkat daerah?

Untuk melengkapi peta upaya pemantauan dan evaluasi program pembangunan melalui indikator MDGs yang diupayakan daerah, dilakukan studi dengan mengadakan kunjungan ke berbagai dinas yang ada di 5 kabupaten studi, yaitu Bantaeng, Takalar dan Bone di Provinsi Sulawesi Selatan serta Polman dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.

Apa tujuan dari studi yang dilakukan di 5 kabupaten?

Kegiatan studi bertujuan untuk memetakan upaya daerah dalam pemantauan program pembangunan khususnya pelayanan sosial untuk ibu dan anak menggunakan indikator-indikator MDGs dengan cara mewawancarai pejabat yaitu kepala instansi vertikal dan instansi daerah.

Dinas/Instansi mana saja yang dikunjungi untuk melakukan studi?

Instansi/unit kerja penting yang dikunjungi antara lain sebagai berikut:

- Bappeda Bidang Kesejahteraan Rakyat,
- BPS,

- Dinas Pendidikan,
- Kantor Departemen Agama (Kandep Agama),
- Dinas Kesehatan,
- Unit Keluarga Berencana,
- Unit Sosial,
- Unit Kehutanan,
- Unit Lingkungan Hidup,
- Dinas Kependudukan,
- Unit Pemberdayaan Perempuan,
- Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan.

Apa yang diperoleh dari hasil kegiatan studi dengan mewawancarai pejabat dinas/instansi?

Kegiatan wawancara dilakukan untuk melihat ada tidaknya program terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, serta globalisasi, dan melihat ada tidaknya upaya untuk memantau dan evaluasi program tersebut di atas, identifikasi pendekatan/formula yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi tersebut serta pemanfaatan statistik secara umum dalam pemantauan dan evaluasi program pembangunan.

Bagaimana tanggapan dan pengetahuan responden (pejabat atau kepala instansi) di daerah tentang MDGs?

Responden yang ditemui pada umumnya tidak tahu adanya komitmen internasional MDGs. Sebagian yang pernah mendengar belum dapat menjelaskan mengenai MDGs. Bagi pejabat di Sulawesi Barat, karena sosialisasi mengenai MDGs baru sekitar sebulan dilakukan di Pare-pare, maka hanya pejabat yang hadir di sana saja yang tahu tentang MDGs dengan rinci, mengingat resosialisasi belum dilakukan kepada pejabat yang tidak hadir baik secara intern, secara vertikal maupun horizontal. Penyebarluasan informasi tentang MDGs juga belum secara efektif dilakukan di Sulawesi Selatan walaupun MDGs telah diluncurkan lebih dari enam bulan sebelumnya.

Bagaimana pengetahuan pejabat instansi/dinas di daerah, khususnya 5 kabupaten tentang data dan indikator pembangunan?

Masih banyak responden yang tidak secara otomatis menganggap indikator sebagai salah satu alat pemantauan. Pemantauan yang utama adalah kunjungan ke lapangan untuk melihat proses kegiatan pelayanan sehingga jarang sekali tercatat dalam data-base pemantauan. Fungsi indikator sebagai alat pemantauan kinerja program pembangunan masih perlu disosialisasikan.

Sampai sejauh mana ketersediaan data dan indikator pembangunan pada tingkat daerah?

Berbeda dengan tingkat nasional dan provinsi dimana lebih dari setengah indikatornya telah tersedia secara tahunan, untuk keperluan pembangunan di tingkat kabupaten/kota hanya tersedia indikator yang terbatas jumlahnya untuk pemantauan dan evaluasi kinerja. Apalagi pada tingkat wilayah yang lebih kecil hampir tidak tersedia data/indikator untuk mendukung perencanaan daerah yang terkait dengan prioritas lokasi pembangunan dan alokasi sumber daya dan dana pada tingkat kecamatan.

Bagaimana sistim pendataan yang digunakan instansi/dinas di daerah?

Sistem pendataan yang dipakai dinas-dinas di berbagai daerah umumnya masih mengacu pada sistem pendataan lama seperti sebelum otonomi daerah. Masukan data untuk kebijakan juga masih melalui sistem pengumpulan data yang lama yaitu dari catatan administrasi.

Bagaimana proses penyediaan data dan indikator yang tersedia di daerah?

Bila pembuat kebijakan masih membutuhkan informasi, maka mereka akan mencarinya di instansi lain seperti BPS, Bappeda, atau ke kantor kecamatan. Dengan data dari catatan administrasi ini ternyata tidak mudah untuk menyusun indikator pada tingkat wilayah kecil misalnya kecamatan, karena fasilitas pelayanan sosial yang ada tidak terdapat di semua kecamatan.

Apa hasil dari kunjungan ke instansi/dinas daerah dalam hal penanganan program pembangunan?

Dalam kunjungan ke berbagai instansi ditemukan bahwa nama unit kerja yang menangani program di bidang kemiskinan/kelaparan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender/pemberdayaan perempuan, dan lingkungan hidup bervariasi antar-kabupaten. Tingkat eselon dari unit kerja pun bervariasi, mulai dari eselon II sampai eselon IV. Dengan demikian penanganan programnya pun berbeda-beda.

Penanganan Ketersediaan data dan indikator serta upaya penyediaannya untuk memantau program pembangunan pada instansi di tingkat daerah adalah sbb:

- **Bappeda**

Sebagai instansi yang salah satu tugasnya merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang termasuk pembangunan sosial, ekonomi dan budaya, Bappeda sangat membutuhkan data statistik mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Data statistik yang dibutuhkan dihimpun oleh unit pendataan di Bappeda. Unit pendataan dalam Bappeda memperoleh data dari pihak kecamatan, dari dinas dalam lingkungan pemda, atau dari instansi vertikal di kabupaten. Bila data yang dibutuhkan tadi tidak tersedia di mana-mana, atau apabila data terlalu banyak tersedia sehingga membingungkan, maka diupayakan untuk memperolehnya langsung dari lapangan.

- **BPS**

Selain menjalankan tugasnya selaku koordinator pelaksanaan lapangan dari survei yang menjadi tugas BPS pusat, kantor BPS daerah juga membantu pemerintah daerah dalam mengupayakan ketersediaan data untuk masukan penyusunan kebijakan pembangunan di daerah. BPS bekerja sama dengan Bappeda tingkat provinsi atau kabupaten berupaya antara lain menyusun berbagai indikator di bidang sosial-ekonomi dari hasil survei yang dilakukan BPS pusat di daerah seperti penyusunan analisis situasi ibu dan anak dan PDRB. Terkait dengan pelayanan sosial untuk ibu dan anak, BPS dengan bantuan dari Bappeda mengumpulkan informasi yang tersedia di berbagai sektor dalam bentuk terbitan “Kabupaten Dalam Angka” atau daerah dalam angka yang disingkat dengan DDA. Di samping itu di Kabupaten Polman, Bantaeng dan Takalar telah pula dilakukan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) guna memenuhi kebutuhan pemda dalam perencanaan pembangunan di kecamatan.

- Dinas Pendidikan

Pemantauan kemajuan pendidikan yang sudah tertata dengan baik di dinas pendidikan adalah sistem pendataan SD, SMP, dan SMU/SMK dengan format baku yang dirancang dari pusat. Informasi tentang sekolah yang dikumpulkan adalah kondisi dan jumlah tenaga pengajar, siswa, dan sarana/prasarana sekolah. Ketiga jenis formulir tersebut dikirimkan dan diolah di bagian perencanaan. Laporan tahunan berupa profil pendidikan kabupaten tersedia di kantor dinas walaupun kadang-kadang tidak berbentuk publikasi yang memadai. Pengumpulan data perguruan tinggi mengalami kesulitan karena laporan tidak dikumpulkan di tingkat kabupaten.

Kegiatan pendataan pendidikan luar sekolah seperti buta huruf belum tertata dengan baik, pada hal dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan MDGs yang kedua dan ketiga.

Untuk memperoleh data yang terkait dengan tugas Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Kabupaten Takalar telah berupaya dengan melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk menghimpun informasi tentang kebutaaksaraan fungsional per desa yang kemudian dibuat rekapnya per kecamatan.

- Kantor Departemen Agama Kabupaten (Kandep Agama)

Dari pengawas di tingkat kecamatan Departemen Agama memperoleh data tentang pendidikan madrasah di Indonesia melalui sistem pendataan yang disebut dengan *Education management Information System (EMIS)*. Petugas mengumpulkan catatan administrasi sekolah yang telah mengikuti format EMIS tersebut dari madrasah yang ada di kecamatan tempat ia bertugas. Data pendidikan sekolah madrasah ibtidaiyah ini akan digabungkan dengan data pendidikan sekolah dasar negeri menjadi pembilang dalam penghitungan indikator partisipasi murni sekolah dasar. Hal yang sama juga dilakukan terhadap data SMP dengan Madrasah Tsanawiyah dan SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sekolah lainnya.

- Unit kerja/Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan instansi yang paling banyak terkait dengan MDGs yaitu menanggulangi kelaparan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan memerangi penyakit HIV/AIDs dan penyakit menular lainnya, serta melestarikan lingkungan hidup.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dinas dilakukan antara lain melalui Sistem Pelaporan dan Pencatatan Terpadu Puskesmas (SP2TP) yang sudah lama diterapkan. Formulir baku laporan bulanan LBI -4 diisi oleh petugas Puskesmas, kemudian dikumpulkan di dinas kesehatan kabupaten dan diringkas untuk dilaporkan ke dinas kesehatan provinsi. Laporan serupa dari pihak rumah sakit dan pelayanan kesehatan swasta tidak dicakup dalam sistem ini. Data yang dilaporkan oleh Puskesmas bisa berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan bisa juga dari kegiatan kader kesehatan atau bidan di desa.

Hasil pengolahan oleh dinas di kabupaten dan juga provinsi secara tahunan dijadikan komponen utama buku Profil Kesehatan Kabupaten dan Profil Kesehatan Provinsi. Setelah dilengkapi dengan berbagai data kesehatan yang penting dari unit utama departemen terutama Direktorat Pelayanan Medis, di tingkat pusat, data laporan ini diolah dan diterbitkan sebagai Profil Kesehatan Indonesia.

- **Unit Kerja/Dinas Keluarga Berencana (KB)**

Unit yang menangani tugas BKKBN di daerah baru pada beberapa tahun terakhir ini diserahkan kepada Pemda. Di 5 kabupaten yang dikunjungi nama unit setara eselon II yang menangani KB berbeda-beda. Walaupun demikian kegiatan pendataan yang dilakukan sebagian masih mengacu pada pola lama.

Kegiatan pendataan utama yang terkait dengan MDGs adalah pendataan keluarga. Pendataan yang dikoordinasikan oleh BKKBN pusat ini bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi tentang data demografi, KB, dan tahapan keluarga. Identifikasi keluarga pra-sejahtera, sejahtera tahap I, sejahtera tahap 2, dan sejahtera tahap 3+ adalah untuk menentukan keluarga mana yang akan menjadi sasaran program.

- **Unit kerja/Dinas Kesejahteraan Sosial**

Di tingkat pusat, departemen yang menangani urusan kesejahteraan sosial sempat dibubarkan tetapi dibentuk kembali kira-kira bersamaan dengan dimulainya otonomi daerah.

- **Dinas/unit Kehutanan dan Unit Lingkungan Hidup**

Pengelolaan hutan di 5 kabupaten umumnya digabungkan dengan pengelolaan perkebunan seperti yang terjadi Bone, Mamuju, dan Polman, atau digabungkan dengan unit lainnya seperti di Bantaeng dan Takalar. Walau demikian fungsi unit kehutanan di lima kabupaten terpilih tersebut pada umumnya sama,

yaitu antara lain melaksanakan urusan penghijauan, konservasi tanah dan air, pengelolaan hutan rakyat, hutan lindung, dan perlindungan hutan.

Indikator yang dapat disumbangkan dalam pemantauan MDGs tingkat kabupaten yaitu proporsi luas lahan yang tertutup hutan, ratio luas kawasan lindung terhadap daratan. Indikator lain seperti luas lahan kritis yang memerlukan penghijauan juga penting dalam menggambarkan keberlanjutan lingkungan hidup yang menjadi tujuan dalam MDGs. Kesamaan lainnya di antara unit-unit tersebut adalah tidak tersedianya data base tentang indikator-indikator tersebut di dalam unit kerja ini.

Untuk sementara indikator penggunaan sumber daya alam dan pencemaran udara yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi MDGs hanya energi yang dipakai (setara barel minyak per PDB) dan emisi CO₂ (kg per kapita). Kedua indikator ini ternyata tidak dikumpulkan oleh unit lingkungan hidup di lima kabupaten terpilih.

- Instansi lainnya

Instansi lainnya yang belum dibahas dan mempunyai kaitan dengan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan/kelaparan, perbaikan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan pemberdayaan perempuan berpotensi besar untuk mempunyai data yang dapat mendukung tersedianya indikator MDGs. Dinas/unit kependudukan, pertanian/ketahanan pangan, UKM, dan pemberdayaan perempuan diharapkan mendasarkan kegiatannya dari data yang mereka hasilkan.

Kegiatan apa lagi yang dilakukan untuk mengetahui ketersediaan data dan indikator di daerah serta upayanya ?

Kegiatan studi dengan menggunakan metode Action Research dengan tujuan mengidentifikasi sistem dan implementasi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan melalui pengkajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing Dinas/ instansi di tingkat kabupaten.

Apa yang dimaksud dengan menggunakan metode Action Research?

Metode action research terdiri dari 2 komponen, pertama desk study untuk mengungkap permasalahan dari sistem pemantauan dan evaluasi yang berlaku

saat ini dengan melakukan penelaahan pada dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi, serta diskusi dengan perencana dan pelaksana program di tingkat dinas pada tingkat kabupaten. Kedua field study untuk melihat kenyataan lapangan di tingkat pelaksana pelayanan dan program di desa dan kecamatan pada sektor yang sama dan pengamatan dan diskusi dengan pelaksana pelayanan program di unit pelayanan

Sektor apa yang menjadi obyek penelitian dengan metode desk study ini?

Sektor yang menjadi obyek penelitian adalah pendidikan, kesehatan, KB, pertanian/ ketahanan pangan, dan Bappeda.

Bagaimana sistem monitoring kegiatan dan program yang terdapat pada setiap SKPD?

Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dan program pada umumnya sudah ada di Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian.

Secara umum mekanisme monev di setiap instansi tersebut dilakukan melalui tiga cara yang saling terkait yaitu

- (i) Kompilasi Pelaporan dari Unit Pelaksana Pelayanan (UPP),
- (ii) Kunjungan langsung ke UPP dalam rangka monitoring teratur pada program dan kegiatan pelayanan yang secara rutin dilaksanakan serta monitoring khusus pada kegiatan yang bersifat *ad hoc*, dan
- (iii) Rapat Monitoring yang diselenggarakan dalam rangka evaluasi atas kemajuan dari program dan kegiatan yang sedang diselenggarakan (*ongoing progress evaluation*). Pelaporan dilakukan oleh unit pelayanan di tingkat desa atau kecamatan menggunakan formulir atau catatan petugas pelayanan.

Untuk memantau pencapaian target pembangunan, apa yang sudah dilakukan oleh SKPD?

Untuk memantau pencapaian target beberapa SKPD bahkan sudah melakukan pendataan khususnya untuk memperoleh data mikro. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan melakukan pendataan dengan standar internasional untuk penyakit yang bersifat lokal yang tidak hanya dibiayai oleh APBD tetapi juga sumber-sumber anggaran lainnya termasuk yang difasilitasi oleh UNICEF seperti PBM

(Pendataan Berbasis Masyarakat) dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang keduanya lebih difokuskan pada bidang pendidikan.

Bagaimana pemahaman instansi/dinas di daerah tentang data sebagai alat monitoring kegiatan dan program?

Terkait dengan otonomi daerah dimana terjadi penggantian beberapa pejabat di tingkat kabupaten yang masih banyak di antara pejabat baru yang kurang memahami pentingnya data sebagai alat ukur tingkat keberhasilan program. Padahal data inilah yang akan menjadi bahan penyusunan keberhasilan program yang tertuang dalam LAKIP

Kendala apa yang dialami dalam penyusunan laporan kegiatan?

Kendala utama dalam penyusunan LAKIP yang disusun oleh Bagian TU adalah sulitnya menguraikan indikator kinerja yang diperlukan yang disebabkan kurangnya pemahaman mengenai indikator tersebut serta tidak adanya definisi yang jelas.

Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran subdin/bidang untuk menyampaikan laporan tepat waktu dengan alasan belum diterimanya dan keterlambatan laporan dari unit pelaksana di kecamatan dan desa. Selain itu, sejak desentralisasi, laporan seringkali terputus di tingkat kabupaten dan tidak diteruskan ke instansi tingkat provinsi. Sebagai contoh, kurangnya peran SKPD di tingkat provinsi dalam memonitor kegiatan yang anggarannya langsung dari pusat yang pendanaan kegiatannya dari APBN maupun luar negeri.

Apa yang diperoleh dari hasil diskusi dengan perencana dan pelaksana program di tingkat dinas pada tingkat kabupaten dalam memahami MDGs?

Hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan dengan para pejabat SKPD baik pada level pimpinan instansi (pejabat eselon II) sampai kepala seksi (pejabat eselon IV) sebagai pengelola yang diserahi tanggungjawab pelaksana program dalam pemahaman akan fungsi MDGs ternyata hanya memahami MDGs sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan program. Pemahaman yang lebih strategis bahwa fungsi MDGs sebagai *benchmarking* dalam perencanaan program dan kegiatan tidak ditemui di kalangan pejabat SKPD.

Di kalangan pejabat penanggung jawab teknis pada umumnya mereka mengetahui MDGs walaupun tidak mengetahui fungsinya dalam pelaksanaan tugas mereka. Bahkan, sebagian besar pejabat eselon IV pada SKPD yang dikunjungi tidak mengetahui MDGs.

Sampai sejauh mana tingkat pemahaman dan pemanfaatan atas data dan informasi statistik dalam pelaksanaan tugas dari perencanaan dan pelaksana program pada SKPD?

Pemahaman atas sistem data dan indikator pemantauan dan evaluasi program para pejabat dipelbagai tingkatan pada SKPD mengetahui tingkatan indikator dari hulu sampai hilir hanya dari sisi nama, sedangkan pemahaman atas makna setiap indikator tersebut terhadap pelaksanaan penyampaian layanan publik tidak dipahami.

Implikasi yang ditimbulkan adalah bahwa indikator kinerja dan pencapaian dalam dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi program di SKPD tidak terukur dan umumnya hanya menyatakan bahwa kegiatan sudah terlaksana.

Dengan metode field study, instansi mana saja pada tingkat kecamatan yang didatangi dan diwawancarai untuk melihat sistim monitoring dan evaluasi program terkait MDGs?

Kantor kecamatan, kantor cabang dinas pendidikan, kantor Badan Penyuluh Pertanian (BPP), Puskesmas di 15 kecamatan, 15 Posyandu, 15 SD/ Madrasah Ibtidaiyah dan 15 SMP/Madrasah Tsanawiyah. Juga mendatangi 15 kantor desa/ kelurahan dan berwawancara dengan kepala desa/lurah, ketua PKK, pelaksana program keaksaraan fungsional, dan sejumlah kader.

Dari hasil studi, bagaimana sistim pencatatan dan pelaporan data/ informasi sektoral?

Sistim monitoring dan evaluasi program terkait MDGs, pada tingkat kecamatan ditemukan lima sistim data/informasi yaitu:

- (a) Sistim Data Keluarga BKKBN
- (b) Sistim Data Pendidikan
- (c) Sistim Data Kesehatan
- (d) Sistim Data Pertanian
- (e) Sistim Data Pemerintahan

Apa yang dimaksud dengan sistim data?

Sistim data adalah adanya sistim perangkat pada komunitas/instansi yang menunjang

tersusunnya suatu data seperti instrumen, petugas, arus pelaporan serta jadwal kegiatan pengumpulan data/pelaporan.

(a) Sistim Data Keluarga BKKBN

Pendataan keluarga dilakukan setahun sekali. Untuk tahun 2006 pendataan dilakukan pada bulan Oktober - Desember 2006. Petugas pengumpulan data adalah kader KB dan PLKB. Keseluruhan sistim jaringan informasi dari kader hingga PPKB menyatakan bahwa pendataan keluarga dilakukan secara door to door.

(b) Sistim Data Pendidikan

Pada tingkat kecamatan terdapat penamaan yang berbeda-beda unit yang menangani bidang pendidikan dan untuk data pendidikan, terdapat dua sistim pelaporan yaitu sistim pelaporan data pendidikan formal dan sistim pelaporan data pendidikan luar sekolah.

(c) Sistim Data Kesehatan

Basis data kesehatan berasal dari laporan kegiatan puskesmas didukung oleh input data dari kegiatan posyandu. Berdasarkan pengamatan, keseluruhan puskesmas telah menerapkan format pencatatan dan pelaporan kegiatan yang baku/standar. Sedangkan pada tingkat posyandu terlihat adanya variasi dalam hal cakupan maupun pencatatan kegiatan. Sebagian posyandu belum memiliki blanko pencatatan kegiatan, sebagian lagi memiliki blanko, tetapi tidak lengkap dan sebagian yang lain memiliki blanko pencatatan kegiatan yang sangat lengkap.

(d) Sistim Data Pertanian

Basis dari sistim data pertanian adalah laporan kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Secara berkala (bulanan/triwulanan/tahunan), PPL melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang mejadi tanggung jawabnya.

(e) Sistim Data Pemerintahan

Kondisi sistim data pemerintahan antar kecamatan bervariasi. Secara umum sistim data kecamatan masih sangat terbatas. Keadaan ini berkaitan langsung dengan ketaatan desa/kelurahan dalam mengirimkan laporan khususnya ke kantor kecamatan.

Bagaimana pemantauan Pencapaian MDGs?

Untuk melaksanakan pemantauan pencapaian MDGs pada tingkat kabupaten

diperlukan ketersediaan data pada tingkat kabupaten untuk banyak indikator MDGs. Penyajian data sampai pada tingkat kabupaten belum dapat disediakan oleh BPS. Selain itu, pemantauan pencapaian MDGs dan kemajuan kehidupan sosial masyarakat perlu dilihat sampai dengan tingkat kecamatan mengingat kebijakan pembangunan sejak desentralisasi menempatkan wilayah administrasi/daerah kerja pembangunan adalah kecamatan/desa.

Bagaimana keberadaan data untuk penghitungan indikator MDGs sampai saat ini?

Variabel untuk penghitungan indikator MDG dan indikator terkait lainnya sebenarnya oleh BPS telah banyak dikumpulkan melalui berbagai survei rumah tangga seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Data yang diperoleh dari survei-survei tersebut walaupun dilakukan secara berkala (tahunan), tetapi penyajiannya hanya dapat sampai level provinsi dan nasional kecuali untuk beberapa variabel dasar dapat disajikan sampai level kabupaten/kota.

Siapa yang bertanggung jawab untuk penyediaan/pengadaan data dan indikator pembangunan?

Pengadaan data yang dibutuhkan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS dan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan instansi lain. Dalam era otonomi daerah, maka pihak lokal/daerah juga memerlukan berbagai indikator sampai level kecamatan bahkan sampai level desa untuk penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan.

Cara apa untuk memperoleh/mengumpulkan data dan indikator yang dibutuhkan untuk pembangunan?

Ada berbagai cara pengumpulan data yaitu :

- (a) Registrasi atau catatan administrasi
- (b) Sensus, baik sensus lengkap maupun sensus sampel
- (c) Survei sampel, baik *probability* maupun *non probability*
- (d) Eksperimen atau percobaan

Cara mana pengumpulan data yang mana yang dapat dilakukan untuk penyusunan indikator MDGs?

Variabel dan data yang diperlukan untuk penyusunan indikator baik untuk MDG maupun data lainnya dapat dikumpulkan melalui berbagai cara tersebut sesuai dengan sifat variabel masing-masing.

Dengan tuntutan makin beragamnya data yang diperlukan dan terbatasnya waktu dan biaya, cara pengumpulan data yang bagaimana yang paling mungkin untuk dilakukan?

Dengan alasan adanya keterbatasan waktu dan biaya serta cakupan data yang luas, maka perlu dicari jalan cara pengumpulan data lainnya, yaitu melalui survei sampel.

Apa keuntungan dan kelemahan setiap cara pengumpulan data?

(a) Registrasi atau Catatan Administrasi

Keuntungan:

- (•) dapat menghasilkan data sesuai level penyajian tertentu sesuai cakupan pencatatan
- (•) dapat dilakukan efisiensi biaya, karena sensus lengkap tidak diperlukan lagi jika registrasi dilakukan dengan baik dan mengikuti kaidah-kaidah statistik.

Kelemahan:

- (•) belum adanya kesadaran secara penuh terhadap kegunaan data hasil registrasi atau catatan administrasi
- (•) belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan belum mengikuti kaidah untuk menjadi data statistik, serta
- (•) cakupan variabel pada catatan administrasi terbatas.

(•) Sensus Lengkap

Keuntungan:

- (•) data hasil sensus dapat menyajikan data sampai satuan wilayah kecil seperti desa/kelurahan atau kecamatan,
- (•) data dapat dijadikan dasar penyusunan kerangka sampel untuk berbagai survei sampel.

Kelemahan:

- (•) cakupan variabel yang dikumpulkan sangat terbatas,
- (•) pengolahan cukup lama.
- (•) sumber daya manusia (SDM), yang berkualitas sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga yang cukup banyak.

(c) Survei Sampel

Keuntungan:

- (•) cakupan variabel yang dikumpulkan dapat lebih rinci, ketelitian lebih besar, karena petugas pelaksana dapat dipilih yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan yang ditentukan dan dapat diadakan pelatihan serta pengawasan yang intensif,
- (•) pengumpulan dan penyajian data lebih cepat,
- (•) biaya pengumpulan data tidak terlalu besar dibanding dengan sensus.

Kelemahan:

- (•) tidak dapat menyajikan data wilayah kecil atau domain kecil, terutama bila sampel tidak memenuhi persyaratan besarnya sampel minimum yang diperlukan,
- (•) diperlukan kerangka sampel yang memenuhi persyaratan, apabila digunakan *probability sampling*.

Bagaimana pemanfaatan utama data sensus sehubungan dengan pelaksanaan survei sampel?

Data sensus dapat dimanfaatkan untuk penentuan unit sampling melalui pembentukan kerangka sampel yang kalau dilakukan secara terpisah dari sensus akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebagai contoh data sensus penduduk yang berkaitan dengan kependudukan digunakan untuk kerangka sampel survei-survei dengan pendekatan .

Bagaimana caranya untuk mendapatkan estimasi suatu survei sampel yang mewakili populasi?

Apabila dikehendaki estimasi yang mewakili populasi maka dalam suatu survei sampel harus dilakukan penerapan metode sampling dengan menggunakan *probability sampling*.

Cara apa yang dilakukan untuk mendapatkan data yang baik dalam pelaksanaan survei sampel?

Survei sampel tersebut harus dilakukan dengan menggunakan desain sampling yang sesuai serta diikuti dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait sehingga data yang dihasilkan dari survei tersebut diharapkan dapat menjadi informasi dasar yang terpercaya sebagai rujukan perencanaan, penentuan sasaran program dan kebijaksanaan di tingkat kecamatan.

Penelitian apa yang telah dilakukan untuk mendapatkan pola bagaimana menyajikan data sampai tingkat kecamatan?

Dilakukan pengkajian pada data level kabupaten/kota untuk kondisi beberapa tahun misalnya 5 tahun dapat digunakan sebagai masukan untuk mengetahui tingkat heterogenitas/ homogenitas karakteristik antar unit di dalam kecamatan.

Penelitian dilakukan dari data Susenas 2001-2005 untuk melihat tingkat heterogenitas/homogenitas karakteristik antar blok sensus di dalam kecamatan dan antar unit di dalam blok sensus. Dilakukan juga pengkajian tingkat prevalensi suatu variabel antar kecamatan di kabupaten dan tingkat prevalensi antar variabel di dalam kecamatan karena variabel akan sangat menentukan besarnya sampel yang diperlukan.

Berapa besarnya sampel rumahtangga yang diperlukan untuk mendapatkan estimasi tingkat kecamatan?

Besarnya sampel rumahtangga per kecamatan yang dibutuhkan antara 300-500 rumahtangga, yaitu dengan pengkategorian untuk kecamatan dengan rumahtangga di bawah 3 000 rumahtangga diwakili oleh 300 rumahtangga, untuk kecamatan dengan rumahtangga antara 3 000 – 6 000 rumahtangga diwakili oleh 400 rumahtangga sedangkan untuk kecamatan dengan rumahtangga di atas 6 000 dibutuhkan sekitar 500 rumahtangga sampel.

Apa manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penentuan besaran sampel dan metode yang cocok untuk pengumpulan data?

Setiap *stakeholder* yang ingin melaksanakan survei dengan pendekatan rumahtangga dapat langsung memperoleh gambaran metode sampling yang efisien untuk dapat diterapkan termasuk besaran sampel yang diperlukan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Data yang dikumpulkan melalui survei dengan pilihan metode

sampling dimaksud tidak hanya terbatas untuk variabel MDG, tetapi juga untuk variabel-variabel lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

<http://www.bps.go.id>

B. ALUR DATA SEKTORAL

Setelah otonomi daerah, bagaimana cara untuk menata kembali alur data sektoral?

Otonomi daerah menyebabkan terganggunya kinerja dari alur data sektoral, untuk itu dilakukan uji coba penataan sistem di 5 (lima) kabupaten yaitu melalui studi yang dapat mengidentifikasi permasalahan dan memperoleh cara penyempurnaan alur data sektoral

Tahapan studi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji coba untuk memperoleh dokumen serta prosedur studi yang dilakukan di Kabupaten Jeneponto.
2. Observasi tak terlibat yaitu kunjungan kepada unit kerja atau petugas yang dilakukan di SKPD di Kabupaten Takalar.

Hal-hal yang diamati:

- a. Organisasi atau unit kerja yang menangani data
 - b. Sumber daya manusia (jumlah dan kemampuan)
 - c. Fasilitas Komputer/PC/Listrik
 - d. Tempat / Fasilitas ruangan
 - e. Biaya perekaman dan pengolahan data
 - f. Dukungan dan hambatan terhadap kegiatan statistik sektoral
3. Pengisian Kuesioner
Masing-masing Instansi sektoral daerah diminta untuk mengisi kuesioner tentang kegiatan pendataan dalam unit kerja masing-masing. Pengisian kuesioner dilakukan pada saat pertemuan di Makasar.
 4. Pelaksanaan Diskusi Kelompok secara Terfokus (FGD)
Tujuan FGD adalah untuk menjaring informasi mengenai pendataan dan penyempurnaan sistem alur data yang terkait dengan MDG's dan kebutuhan sektor lainnya.

Isu yang di diskusikan meliputi :

- a. Pengumpulan hasil pendataan dari unit kerja terkecil oleh dinas.
- b. Inventory/penerimaan dokumen pendataan di dinas.
- c. Perekaman data.
- d. Pengolahan data termasuk tabulasi data.

- e. Komponen penghitungan indikator seperti pembilang dan penyebut.
 - f. Penyusunan laporan dan diseminasinya.
5. Diskusi untuk menyepakati penyempurnaan sistem alur data.

Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan penataan alur data tersebut?

Penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan pada era otonomi daerah yang tidak didukung dengan ketersediaan data hasil survei untuk wilayah kecil akan tetap dapat berjalan dengan baik jika tersedia data yang berasal dari catatan administrasi atau pendataan sektoral.

Secara umum, data yang bersumber dari catatan administrasi atau pendataan sektoral tidak tersedia manakala dibutuhkan secara cepat, untuk itu dilaksanakan kegiatan penataan alur data sektoral di 6 (enam) instansi sektor di pusat (selain BPS) yang menghasilkan data yang terkait dengan MDGs, yaitu:

1. Departemen Sosial (Depsos)
2. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)
3. Departemen Kesehatan (Depkes)
4. Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Departemen Kehutanan (Dephut)
6. Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH)

Di tingkat provinsi instansi yang terlibat sesuai dengan sektor yang ada di pusat, namun pada tingkat kabupaten nama instansi berbeda antar daerah. Ditingkat kabupaten nama instansi disebut dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Bagaimana hasil proses penataan ulang alur data sektoral?

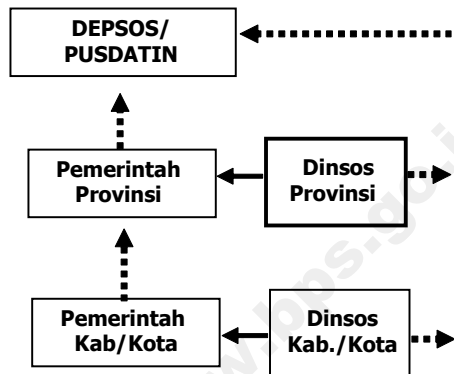
1. Bidang kesejahteraan sosial

Sasaran pokok dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional (RPJM) tahun 2004-2009 disebutkan bahwa Departemen Sosial bertugas untuk “mewujudkan rasa aman bagi masyarakat rentan dan PMKS.

Sejak Otonomi Daerah Sistem alur data PMKS adalah sebagai berikut:
Data PMKS yang dikumpulkan oleh dinas sosial kabupaten/kota hanya

diperuntukkan untuk kepentingan pemerintah kabupaten/kota, begitu pula data PMKS yang dikumpulkan oleh dinas sosial provinsi hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah provinsi saja. Untuk data PMKS yang ada di dinas sosial provinsi maupun di dinas sosial kabupaten/kota tidak menjadi keharusan untuk menyerahkan data tersebut ke Departemen Sosial, seperti Gambar 1:

Gambar 1. Alur Data PMKS Sejak Otonomi Daerah



Agar data PMKS dapat digunakan secara nasional, maka diusulkan alurnya sebagai berikut, atau mengikuti apa yang diterangkan pada Gambar 2:

- » Program atau kegiatan pendataan PMKS yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten dilaksanakan langsung ke masyarakat dan melibatkan unsur-unsur di masyarakat seperti kecamatan, kelurahan dan desa. Program ini berlangsung kurang lebih selama satu tahun anggaran dan hasilnya berupa catatan administrasi yang terdiri dari laporan dan rekapitulasi per kecamatan yang kemudian hasilnya dikirim ke dinas sosial provinsi sebagai bahan laporan. Di dinas sosial provinsi semua laporan-laporan yang masuk dari semua dinas sosial kabupaten, kemudian hasilnya direkap kembali untuk kemudian dikirim ke Departemen Sosial RI sebagai bahan perencanaan dan kebijakan untuk tahun mendatang. Laporan hasil dari seluruh provinsi sebagai statistik sektoral kemudian dipublikasikan oleh Departemen Sosial.
- » Untuk kegiatan pendataan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, orsos dan perusahaan hasilnya berupa data dasar yang dapat dimanfaatkan oleh dinas sosial kabupaten maupun BPS kabupaten. Di BPS kabupaten catatan administrasi maupun data dasar yang didapatkan dari dinas sosial

2. Bidang pendidikan

Sebelum otonomi daerah, Pengumpulan data pendidikan menggunakan dasar hukum, yaitu SK Mendikbud No.0279/U/1977 yang menyatakan bahwa koordinator pengelolaan data di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) merupakan tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Dikbud) yang secara operasional dilaksanakan oleh Pusat Statistik Pendidikan. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pendataan dan menerbitkan statistik pendidikan.

Sampai dengan tahun 2000, alur data pendidikan diurus oleh 3 departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengurus sekolah dasar (SD), Depdikbud mengurus taman kanak-kanak (TK), sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah (sekolah menengah atas/SMA dan sekolah menengah kejuruan/SMK), dan pendidikan nonformal, serta Departemen Agama mengurus madrasah (RA, BA, MI, MTs, dan MA). Dalam melaksanakan tugas, Depdikbud memiliki kantor di daerah, dari provinsi sampai dengan kecamatan, yaitu kantor wilayah di provinsi, kantor departemen di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan pengumpulan data SD, Depdagri berkoordinasi dengan Depdikbud. Instrumen digandakan di kabupaten/kota. Setiap sekolah mengisi instrumen dan menyerahkannya ke kantor cabang dinas tingkat kecamatan. Selanjutnya, data dirangkum menggunakan format rangkuman data kecamatan. Hasil rangkuman data tersebut diserahkan ke kantor dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dirangkum ke dalam format rangkuman data kabupaten/kota. Hasilnya diserahkan ke dinas pendidikan provinsi untuk dirangkum menggunakan format rangkuman data provinsi. Data yang dikumpulkan ini akan digunakan sebagai dasar penentuan besarnya anggaran untuk masing-masing sekolah.

Pengumpulan dan pengolahan data sekolah yang berada di bawah binaan Depdikbud (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan nonformal) dilaksanakan oleh Kanwil Depdikbud dan Kandeptdikbud menggunakan alur data yang sudah ditentukan. Instrumen digandakan di pusat dan dikirimkan ke Bagian Perencanaan (Bagren) Kanwil Depdikbud untuk selanjutnya dikirim ke Subbagian Monitoring Pelaksanaan Program Kandeptdikbud. Selanjutnya, instrumen SMP dan SM dikirim ke masing-masing sekolah. Setelah diisi oleh sekolah, instrumen SMP dan SM dikirim ke Kandeptdikbud. Data dari instrumen SMP dan SM dirangkum oleh Kandeptdikbud menggunakan format

rangkuman data kabupaten. Hasil rangkuman tersebut dikirim ke Bagren Kanwil. Selanjutnya, Bagren Kanwil Depdikbud melakukan perangkuman data menggunakan format rangkuman data tingkat provinsi. Rangkuman data tingkat kabupaten/kota dan provinsi dikirimkan ke pusat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan statistik pendidikan, dan selanjutnya dipakai dalam perencanaan, dan pelaksanaan program, serta perumusan kebijakan.

Pengumpulan dan pengolahan data madrasah dilakukan oleh Departemen Agama (Depag) beserta jajarannya di daerah. Kanwil Depag dan Kandepag memiliki mekanisme pengumpulan pengolahan data sendiri. Kandepag bertugas melaksanakan pengumpulan data, Kanwil Depag melaksanakan pengolahan data, dan Depag melaksanakan verifikasi dan validasi data. Koordinasi dalam pengelolaan dan penggunaan data madrasah dilakukan di setiap tingkat: kabupaten/kota maupun provinsi.

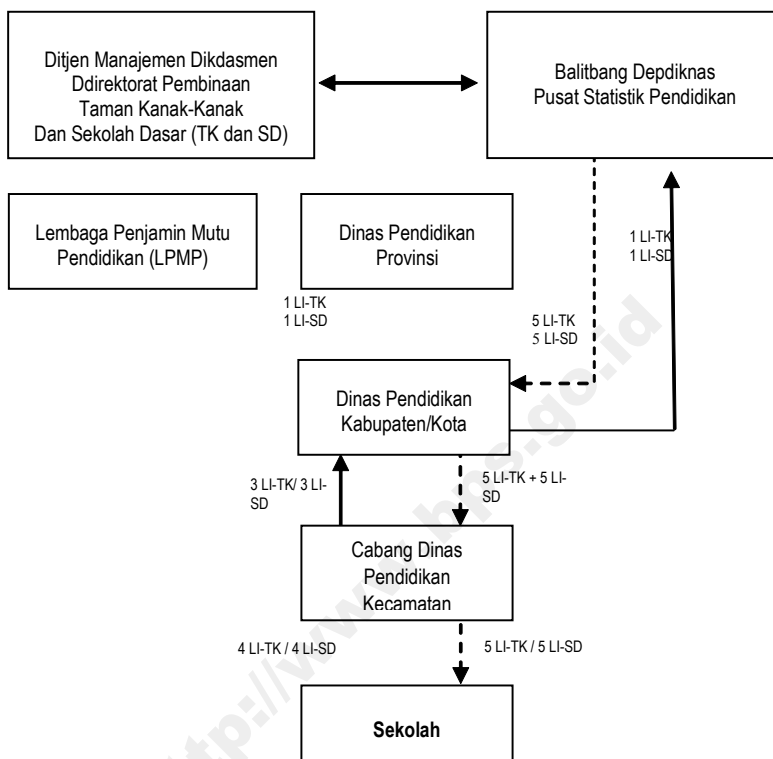
Dengan adanya kebijakan desentralisasi, urusan pendidikan menjadi salah satu sektor yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) tidak mempunyai perpanjangan tangan di daerah sehingga pendataan pendidikan terhambat. Dengan berpedoman pada SK Mendikbud No.0279/U/1977, Balitbang Depdikbud yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan data, mengeluarkan surat edaran Kepala Balitbang No.1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pembentukan Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK Datadik). Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota surat edaran tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan KK datadik yang dikuatkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan.

Untuk sekolah umum pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta untuk madrasah oleh Kanwil Depag dan Kandepag. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh dinas pendidikan merupakan kegiatan bersama dengan Diknas, dalam hal ini Pusat Statistik Pendidikan (PSP). Di kantor dinas pendidikan, baik kabupaten/kota maupun provinsi, pelaksana pengelolaan data adalah KK Datadik yang dipimpin oleh seorang ketua.

Mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data pendidikan dibedakan menjadi 4 jenis pendidikan, yaitu:

1. TK dan SD (Gambar 3)
2. SMP dan SM (Gambar 4)
3. SLB (Gambar 5)
4. Pendidikan non-formal (Gambar 6)

Gambar 3. Arus Penyebaran dan Pengembalian
Laporan Individu TK dan SD

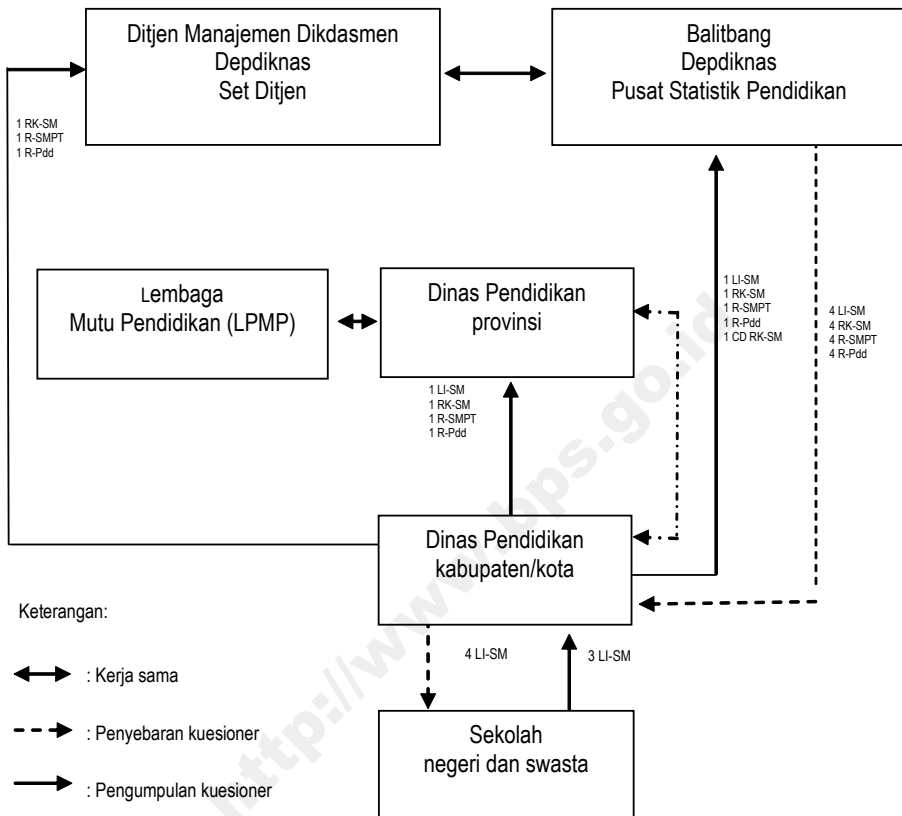


Keterangan:

- 1) LI-TK: Laporan Individu Taman Kanak-kanak
- 2) LI-SD: Laporan Individu Sekolah Dasar

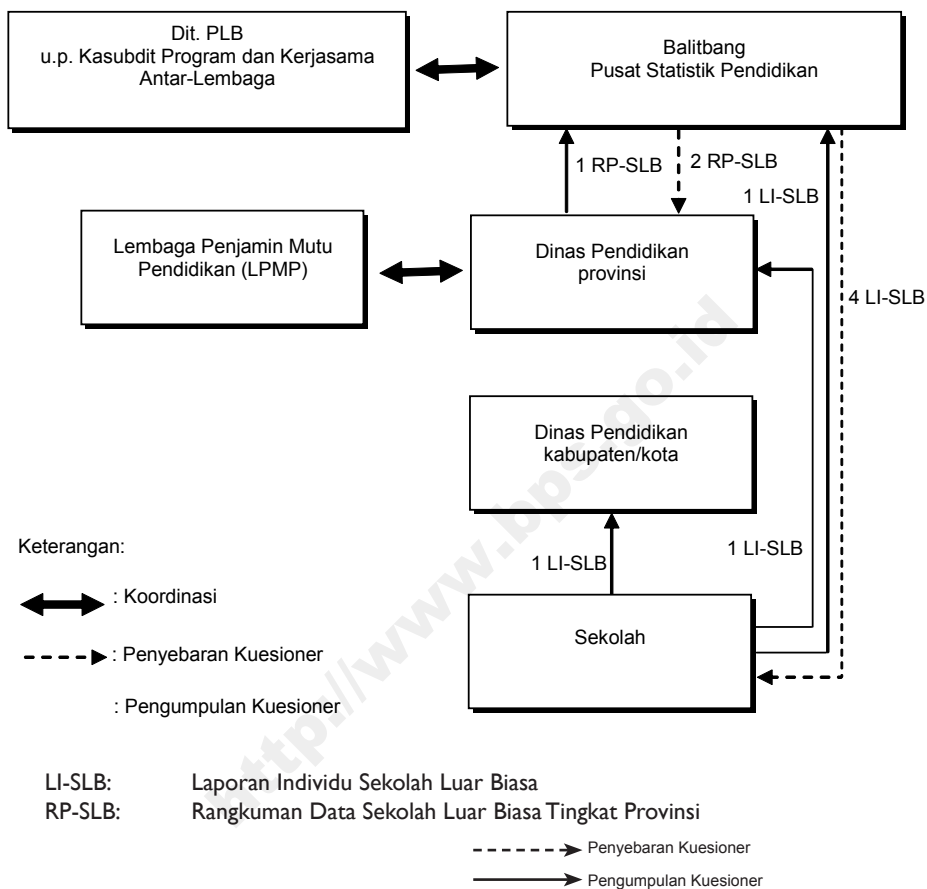
-----> Penyebaran Kuesioner
 -----> Pengumpulan Kuesioner

Gambar 4. Arus Penyebaran dan Pengembalian
Laporan Individu SMP dan SM

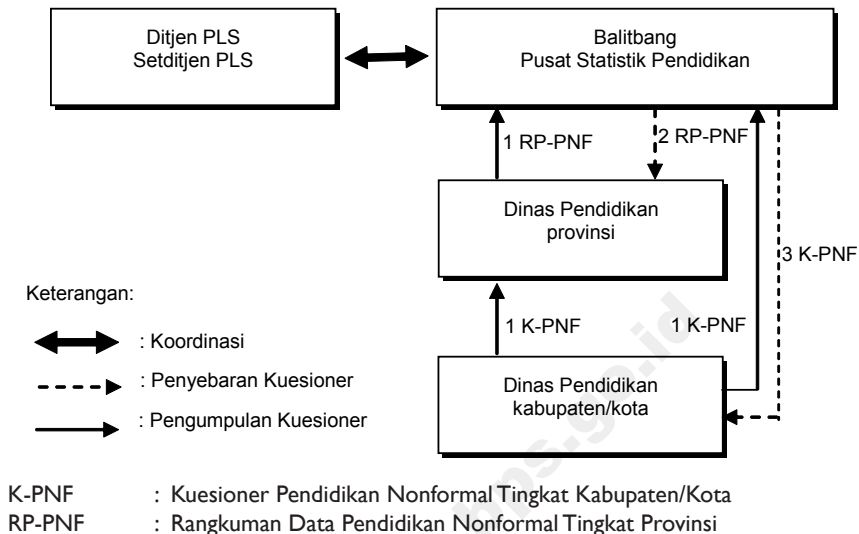


LI-SM: Laporan Individu Sekolah Menengah Pertama dan Menengah
 RK-SM: Rangkuman Data Sekolah Menengah Pertama dan Menengah
 Tingkat Kabupaten/Kota
 R-SMPT: Rangkuman Data Sekolah Menengah Pertama Terbuka
 Tingkat Kabupaten/Kota
 R-Pdd: Rangkuman Data Penduduk

Gambar 5. Arus Penyebaran dan Pengembalian
Laporan Individu SLB



Gambar 6. Arus Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Pendidikan Nonformal



Keberhasilan ketersediaan data pendidikan selama ini belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan, karena tidak tersedianya unit khusus yang menangani. Sementara itu belum semua sekolah didata, misalnya sekolah kedinasan swasta. Perbedaan tempat tinggal siswa dan tidak adanya jumlah penduduk wilayah kecil menyebabkan kesulitan dalam penghitungan indikator pendidikan.

3. Bidang Kesehatan

Alur pengumpulan data terkait indikator MDGs bidang kesehatan pada umumnya masih mengikuti mekanisme dari sub-sistem yang pernah berjalan seperti Sub-sistem Informasi Puskesmas, Sub-sistem Informasi Rumah Sakit dan Sistem Terpadu Penyakit serta Sub-sistem Pemantauan Status Gizi sebagai berikut:

a) Alur data dari Puskesmas (Gambar 7)

- Data Puskesmas yang berasal dari kegiatan harian, baik dari kegiatan dalam gedung maupun luar gedung Puskesmas dan Puskesmas pembantu serta bidan di desa, dikumpulkan di Puskesmas oleh masing-masing pengelola program di Puskesmas, misalnya program kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit, promosi kesehatan dan lainnya.

- Data tersebut kemudian diagregasi oleh pengelola SP2TP ke dalam formulir laporan bulanan Puskesmas (LB1 dan LB3).
- Laporan bulanan tersebut kemudian dikirimkan ke dinas kesehatan kabupaten.
- Kemudian dilakukan rekapitulasi seluruh Puskesmas oleh petugas SP2TP kabupaten untuk dikoordinasikan dengan pengelola program di dinas kesehatan kabupaten.
- Selanjutnya rekapitulasi laporan Puskesmas diteruskan ke dinas kesehatan propinsi dan pusat (Departemen Kesehatan).

b) Alur data dari Rumah Sakit (Gambar 8)

- Data dari rumah sakit baik pemerintah maupun swasta yang berasal dari kegiatan harian, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dikumpulkan oleh petugas rekam medik rumah sakit.
- Data tersebut kemudian diagregasi oleh petugas rekam medik dalam formulir laporan bulanan rumah sakit sebagai berikut:
 - Laporan data keadaan morbiditas pasien rawat inap rumah sakit (RL2a)
 - Laporan data keadaan morbiditas pasien rawat jalan rumah sakit (RL2b).
 - Laporan data keadaan morbiditas pasien rawat inap surveilans rumah sakit (RL2a I).
 - Laporan data keadaan morbiditas pasien rawat jalan surveilans rumah sakit (RL2b I).
 - Laporan data status imunisasi (RL2c).
- Laporan tersebut secara bersamaan dikirimkan ke dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan propinsi dan Departemen Kesehatan (Ditjen Pelayanan Medik).

c) Alur data Sistem Terpadu Penyakit /STP (Gambar 9)

- Untuk melakukan upaya pemberantasan penyakit menular, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan keracunan, serta penanggulangan penyakit tidak menular diperlukan suatu sistem surveilans penyakit secara terpadu yang bersumber dari Puskesmas, rumah sakit dan laboratorium dengan menggunakan formulir STP Pus STP RS dan STP Lab.

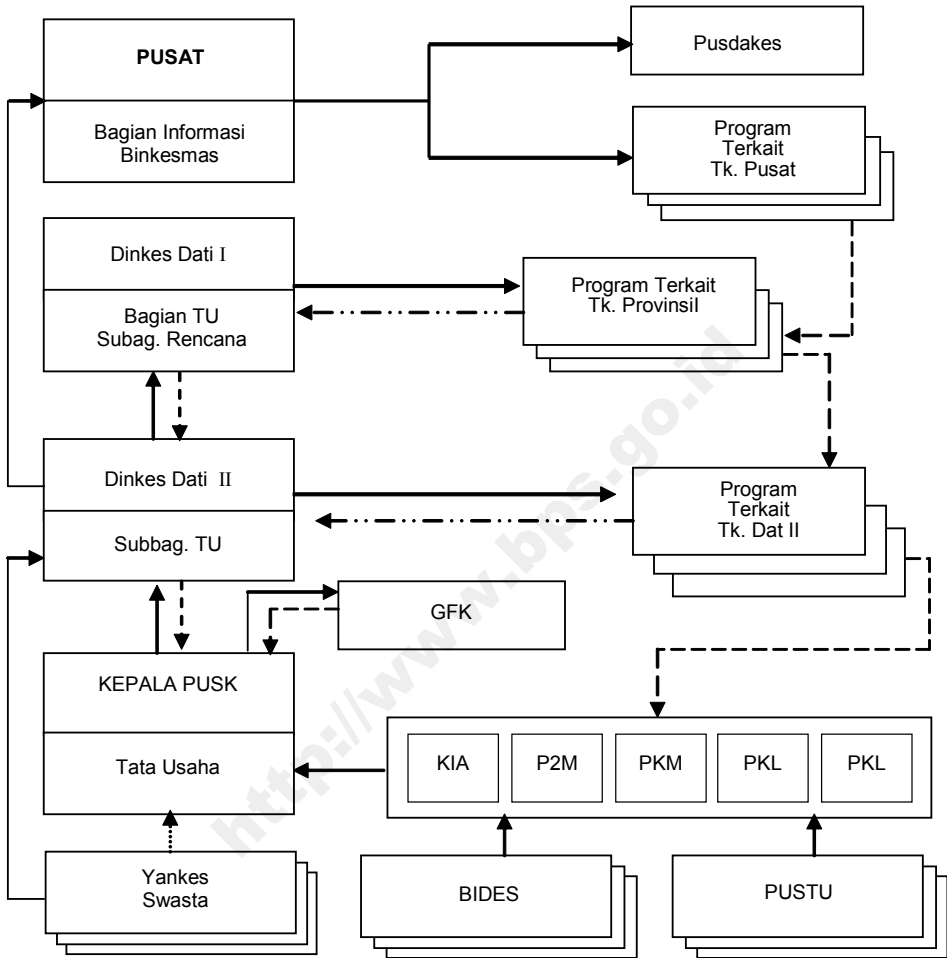
- Data STP tersebut di atas kemudian diagregasi dalam formulir STP. PUS.KAB., STP.RS.KAB. dan STP.LAB.KAB oleh dinas kesehatan kabupaten.
- Selanjutnya rekapitulasi laporan STP tersebut diteruskan ke dinas kesehatan propinsi dan pusat (Departemen Kesehatan).

d) Alur Pemantauan Status Gizi (Gambar 10)

- Untuk memantau status gizi Balita, telah dikembangkan survei pemantauan status gizi yang dilakukan secara berkala, yang dilakukan oleh tim pemantau gizi Puskesmas dengan menggunakan formulir FI/PSG-KADARSI dan F2/PSG-KADARSI dan F3/PSG-KADARSI.
- Formulir pengumpulan data FI/PSG dan FII/PSG yang telah diisi lengkap oleh TPG Puskesmas, segera dikirim ke Dinkes kabupaten/kota.
- Selanjutnya FII/PSG dari seluruh kecamatan direkapitulasi pada formulir FIII/PSG.
- Selanjutnya rekapitulasi FIII/PSG tersebut diteruskan ke dinas kesehatan propinsi dan pusat (Departemen Kesehatan).

Namun demikian sejak otonomi daerah alur tersebut tidak berjalan dengan baik, karena di dinas kesehatan kabupaten tidak adanya unit yang menangani. Umumnya pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data diserahkan kepada staf yang kurang sibuk dalam tugasnya sehari-hari. Hambatan lain yang ditemui, adalah cakupan rumah sakit, yang tidak mendata rumah sakit swasta. Sementara itu perbedaan batas wilayah administrasi dan pelayanan, serta ketidaktersediaan jumlah penduduk di wilayah kecil menyebabkan kesulitan dalam menghitung indikator kesehatan. Di tingkat pusat, data yang tersedia tidak tepat waktu, karena pengelolaan data puskesmas dan rumah sakit ditangani oleh unit yang berbeda.

Gambar 7. Alur Data dari Puskesmas (SP2TP)

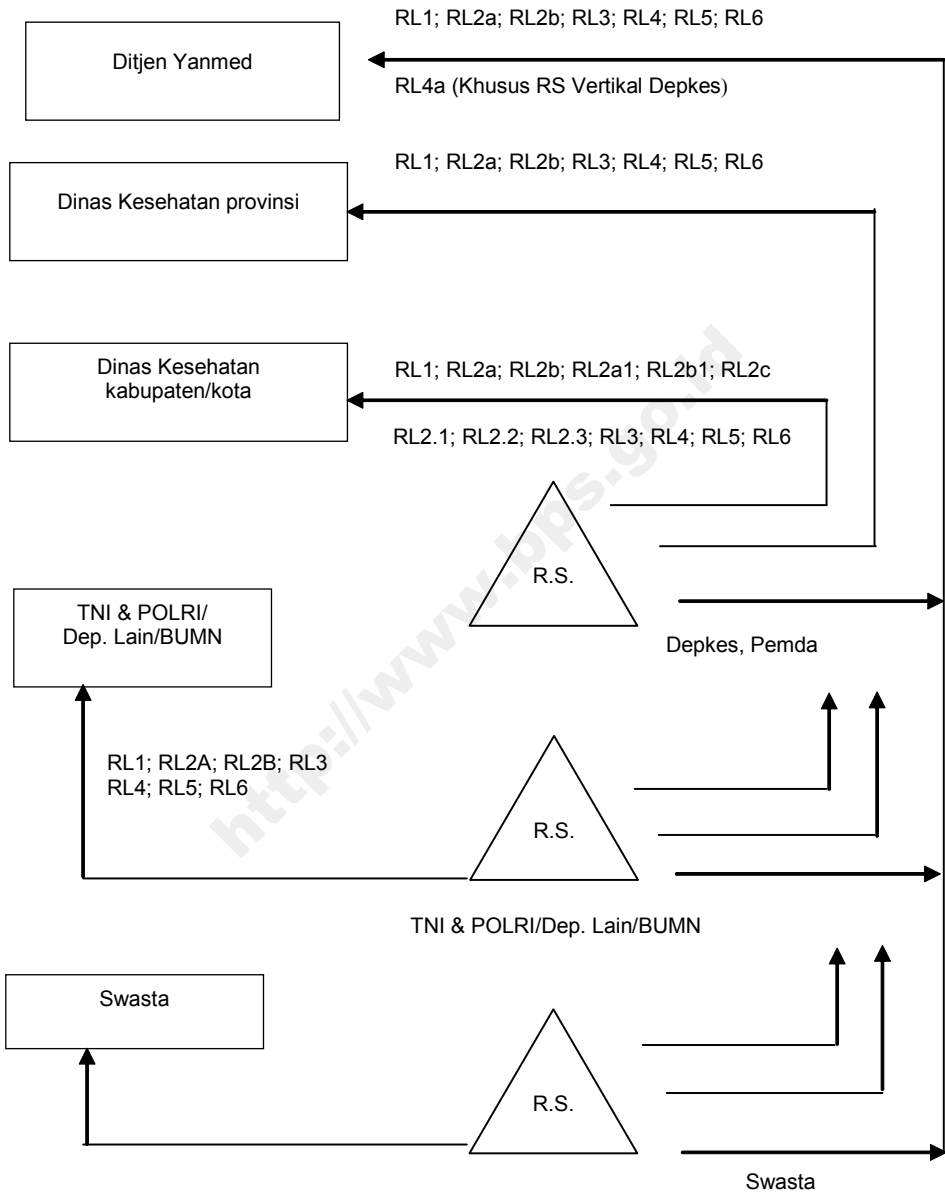


KETERANGAN:

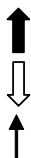
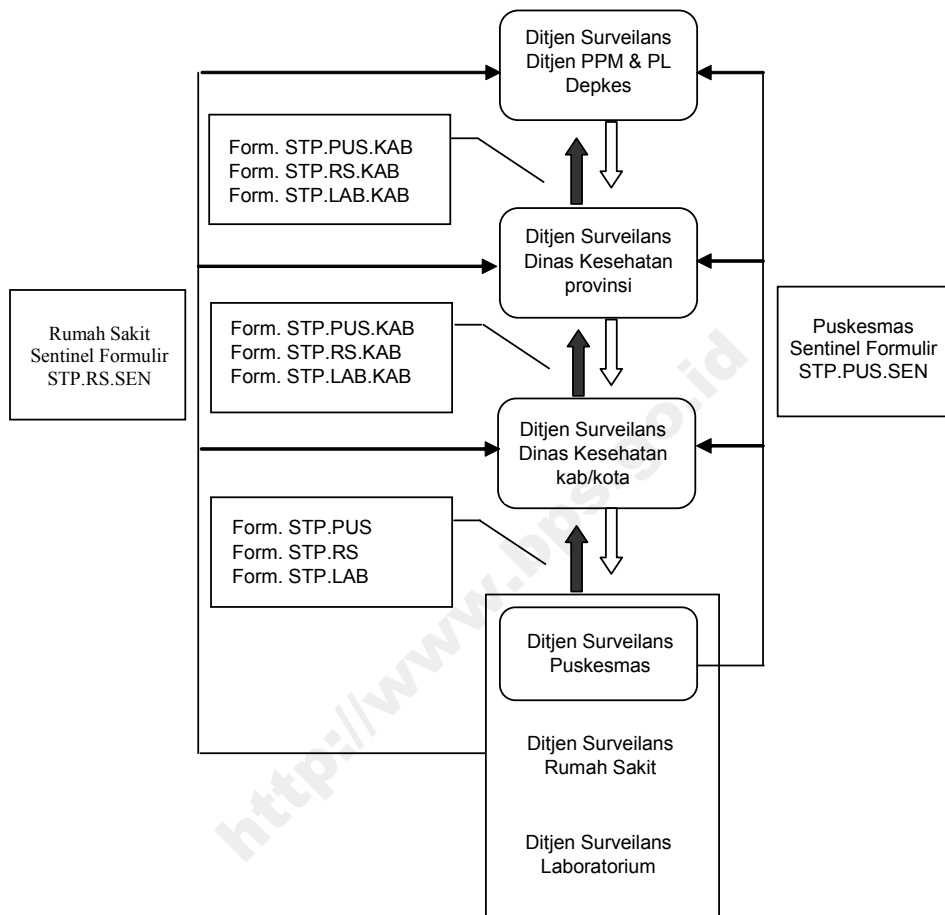
- > GARIS LAPORAN SP2TP
-> LAPORAN TEMBUSAN
- > HASIL OLAHAN/REKAP

- - - -> GARIS UMPAN BALIK
- . . -> KOREKSI DATA
- - - -> GARIS PEMBINAAN

Gambar 8. Alur Data dari Rumah Sakit (SP2RS)



Gambar 9. Alur Sistem Terpadu Penyakit

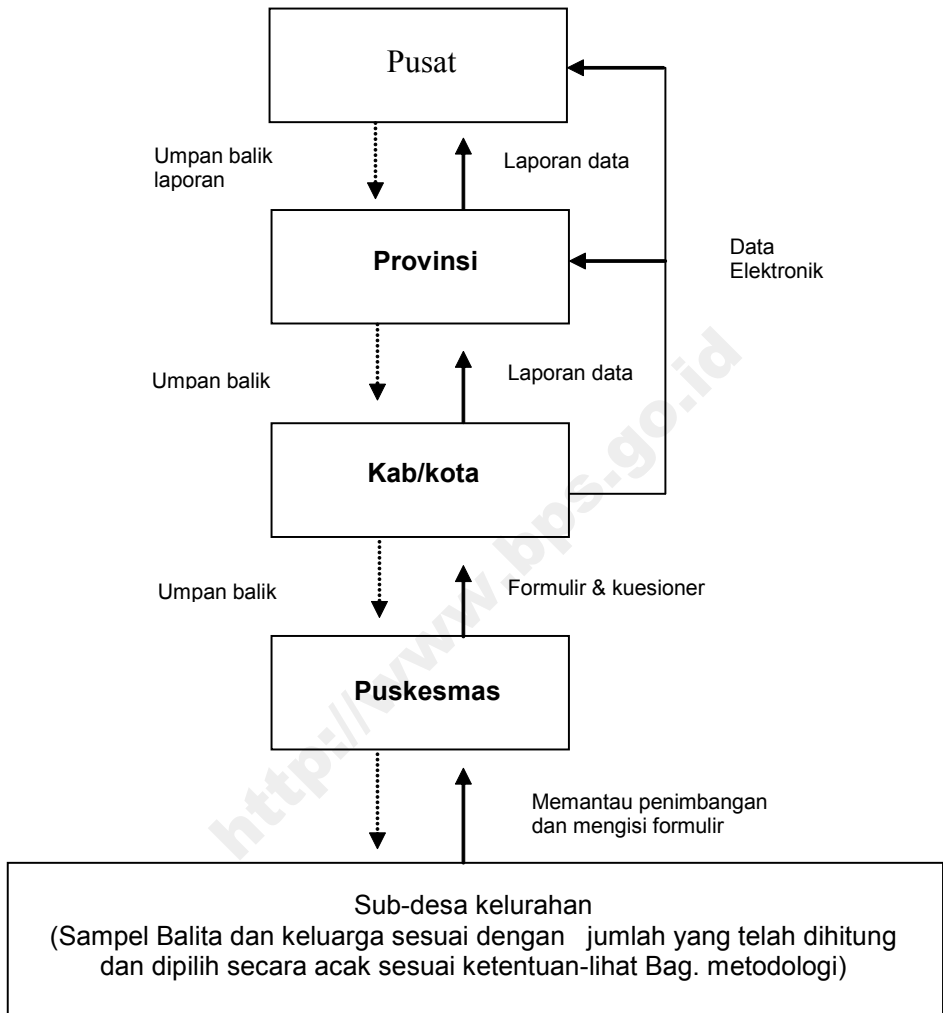


Thick black upward arrow: Distribusi data surveilans dari Unit Surveilans kepada Unit Surveilans yang akan melakukan kompilasi data

Thin black downward arrow: Distribusi data surveilans dari Unit Surveilans yang melakukan kompilasi data kepada semua Unit Surveilans yang melakukan pengiriman data

Thin black upward arrow: Distribusi data surveilans dari PUSKESMAS dan Rumah Sakit Sentinel

Gambar 10. Alur Pemantauan Status Gizi

**Keterangan:**

.....→ Umpan balik

← Arus pelaporan

4. Bidang Keluarga Berencana

Monitoring dan evaluasi menjadi ciri penting dalam perkembangan program KB. Penerapan sistem informasi yang up to date merupakan salah satu dari sasaran program KB. Untuk itu telah dikembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Program KB Nasional, yang meliputi tiga hal:

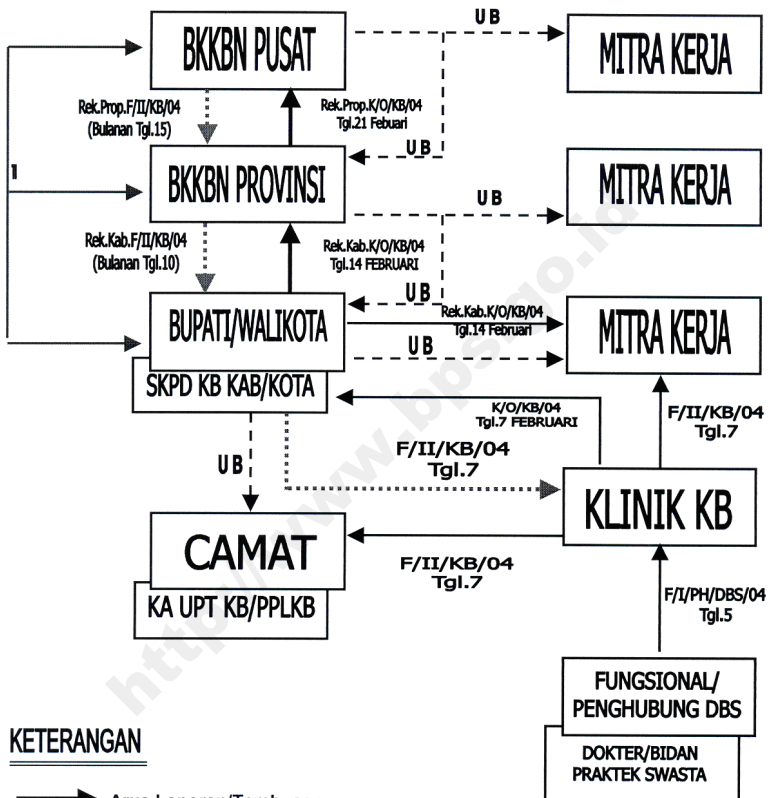
- 1) Pelayanan kontrasepsi,
- 2) Pengendalian lapangan, dan
- 3) Pendataan keluarga.

Ketiga sub-sistem tersebut saling berhubungan, di mana hasil pendataan keluarga menjadi dasar penentuan sasaran untuk kegiatan operasional pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Hasil pelayanan kontrasepsi dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan mekanisme dalam Sub-sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi, dan hasil operasional pengendalian lapangan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan mekanisme dalam Sub-sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan.

Mekanisme alur data dari masing-masing sistem pencatatan dan pelaporan yang dibakukan di BKKBN dapat digambarkan seperti pada Gambar 11 sampai dengan Gambar 13.

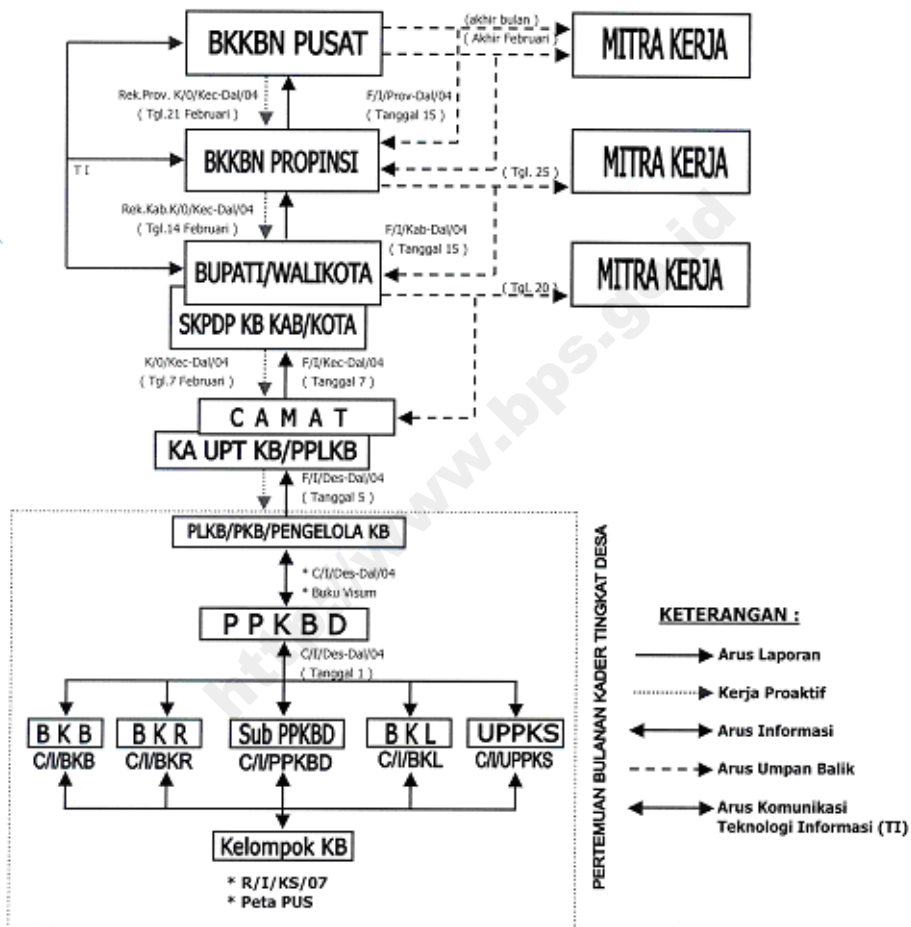
Gambar 11

ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KONTRASEPSI PROGRAM KB NASIONAL



Gambar 12.

ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN LAPANGAN PROGRAM KB NASIONAL



Dengan memperhatikan bagan alur pencatatan dan pelaporan Program KB Nasional, maka di setiap tingkatan wilayah (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) dilakukan pengumpulan, validasi, pengolahan, rekapitulasi, analisis dan penyajian data pada masing-masing unit kerja pengelola data dan informasi sesuai struktur organisasi yang ada. Namun di tingkat kecamatan semua fungsi pengelolaan data dan informasi hanya dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis (Ka UPT)/PPLKB.

Mekanisme pelaporan yang telah ditentukan oleh BKKBN pusat dalam era desentralisasi ini dapat berjalan dengan baik apabila tersedia dukungan tenaga, sarana dan dana yang cukup memadai. Namun pada era desentralisasi ini, jumlah petugas PLKB/PKB sangat berkurang, sebagian dari mereka alih tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Dengan berkurangnya tenaga PLKB/PKB maka pelaksanaan pengelolaan data di lapangan agak terhambat.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya cakupan laporan adalah tidak tersedianya petugas penghubung dokter dan bidan praktek swasta sehingga data hasil pelayanan dokter dan bidan praktek swasta menjadi lebih kecil dari seharusnya (undercoverage).

Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan komputer, tetapi tidak menggunakan program aplikasi khusus, hanya entry di komputer dengan program secara sederhana. Hal ini dilakukan baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dalam mengolah data individu anggota keluarga hasil pendataan keluarga sudah dikembangkan oleh BKKBN pusat. Tampaknya karena kapasitas komputer di provinsi dan kabupaten/kota tidak memadai, maka pengolahan dilakukan secara manual dengan program sederhana bukan program aplikasi khusus.

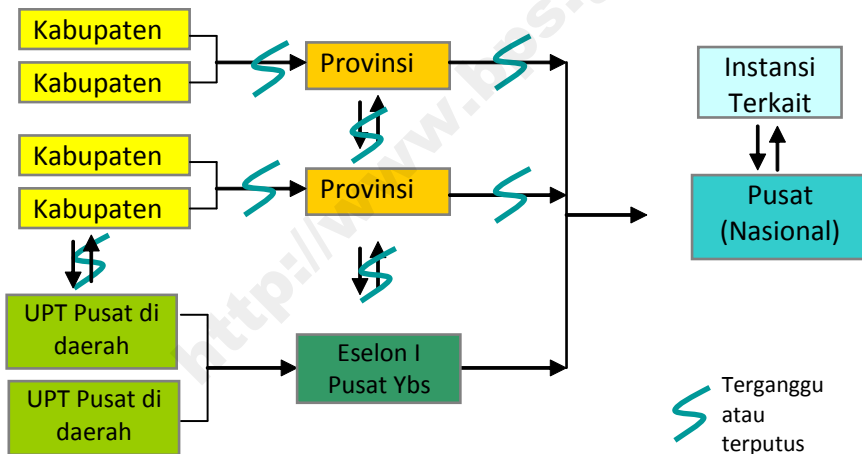
Anggaran didapat baik dari APBD maupun APBN. Namun ada kabupaten yang tidak dapat menerima dana APBD untuk pengelolaan data karena dianggap tidak terdaftar programnya dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Besarnya dana APBD sangat bervariasi, tergantung kepada perhatian Pemda dan pihak legislatif terhadap pentingnya data. Anggaran pendataan keluarga yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp 300.000,- per desa, tetapi biasanya diberikan tidak sesuai dengan jumlah desa yang ada, misalnya di Kabupaten Mamuju hanya diberikan bagi 111 desa dari 121 desa yang ada. Di Kabupaten Takalar bahkan hanya Rp 200.000,- per desa untuk 64 desa dari 77 desa yang ada. Kedua kabupaten

ini beruntung karena perhatian Pemda terhadap pentingnya data cukup tinggi. Dana operasional pendataan keluarga dari APBD sebesar Rp 350.000/desa di Kabupaten Mamuju, dan Rp 96 juta di Kabupaten Takalar.

5. Bidang Kehutanan

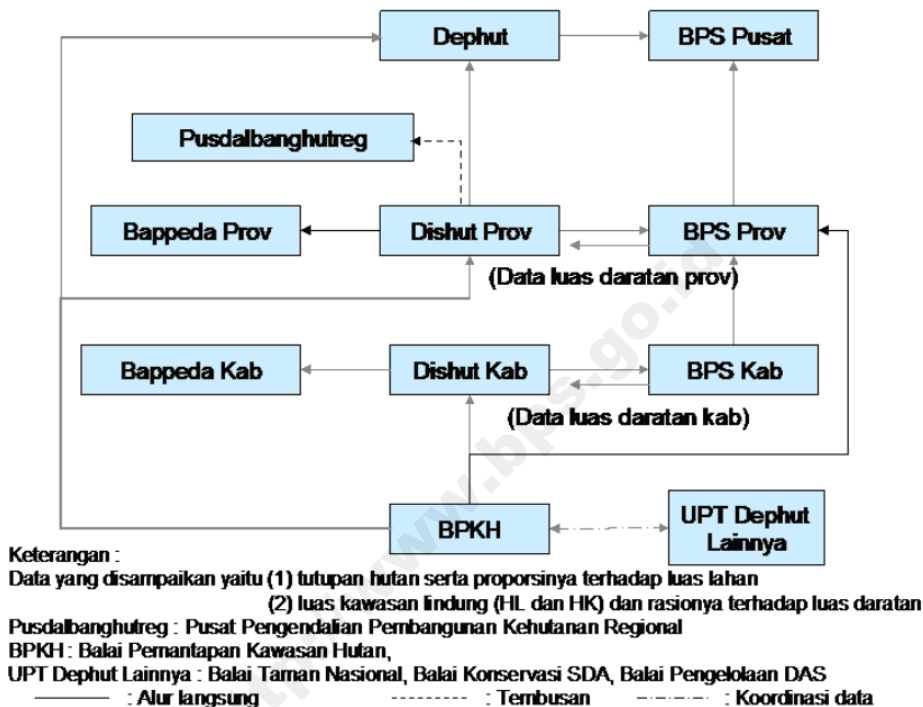
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan, antara lain, ketersediaan data dan informasi kehutanan yang lengkap, akurat dan mutakhir. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan mutakhir sangat diperlukan untuk monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor kehutanan. Sampai saat ini data dan informasi kehutanan dirasakan masih belum memadai. Hal ini disebabkan, antara lain, kurang lancarnya arus data dari daerah. Secara umum kondisi alur data kehutanan dari daerah sampai ke pusat dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Kondisi Alur data Kehutanan



Berdasarkan hasil rapat internal Departemen Kehutanan, usulan alur data kehutanan yang terkait dengan indikator MDGs yang akurat dan tepat waktu dari kabupaten sampai ke tingkat provinsi dan nasional adalah sebagai digambarkan pada Gambar 15.

Gambar 15

USULAN SISTEM ALUR DATA KEHUTANAN

6. Bidang Lingkungan Hidup

Dalam struktur organisasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) terdapat unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan yaitu Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL). Selain itu beberapa unit kerja melakukan pemantauan dalam rangka pelaksanaan program-program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Khusus untuk data dan informasi lingkungan dari daerah, sarana yang digunakan adalah laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dikelola oleh Asisten Deputy Urusan Data dan Informasi.

Evaluasi terhadap semua data lingkungan yang dikumpulkan oleh KNLH dan sektor-sektor terkait dilakukan oleh Asisten Deputy Urusan Data dan

Informasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian dipublikasikan setiap tahun melalui Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Selain itu evaluasi juga dilakukan oleh unit-unit kerja lainnya yang antara lain menghasilkan peringkat kota bersih (ADIPURA), peringkat kinerja industri (PROPER), dan peringkat kinerja kabupaten/kota dalam penghijauan (MIH – Menuju Indonesia Hijau).

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan suatu kumpulan informasi yang memuat tentang keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup pada masing-masing daerah, dan diterbitkan secara berkala sekali setahun oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan laporan SLHD dimulai tahun 1982 ketika Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengembangkan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Pada tahun 1986 NLH berubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) seiring dengan perubahan organisasi menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada tahun 1994 singkatan NKLD tetap dipertahankan walaupun kepanjangannya berubah menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

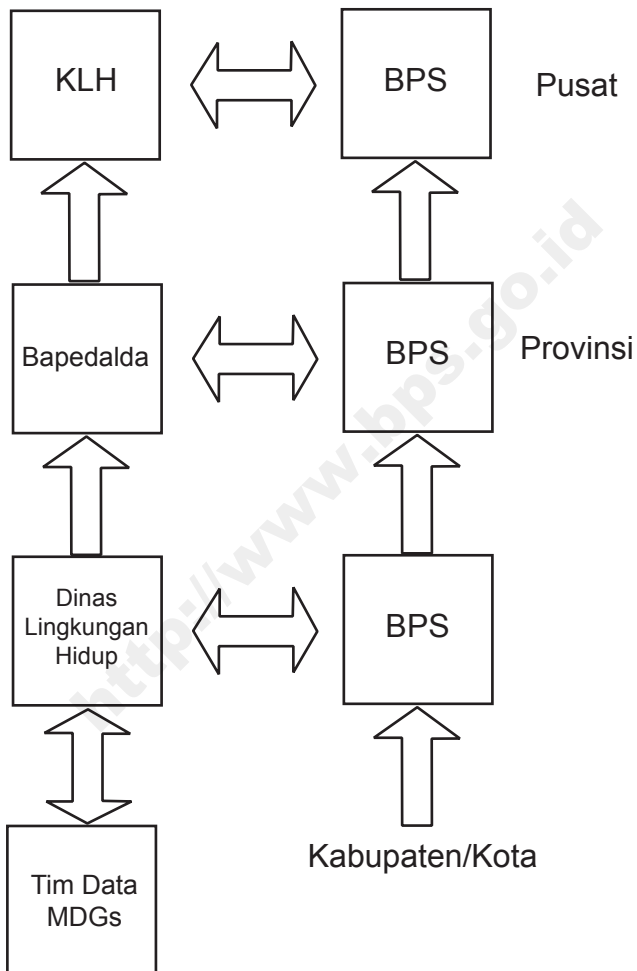
Pada tahun 1995 negara-negara Asia-Pasifik (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific–ESCAP*) menyepakati penggunaan metoda S-P-R (*State-Pressure-Response*) dari UNEP (*United Nation Environment Program*) untuk penyusunan *State of the Environment Report* (SoER) oleh setiap negara dengan maksud agar status lingkungan hidup secara global diketahui. Dengan menerapkan metoda S-P-R dalam analisisnya maka mulai tahun 2001 laporan NKLD dikembangkan menjadi laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Laporan SLHD terdiri dari (a) analisis mengenai kondisi lingkungan hidup yang terjadi di daerah dalam satu tahun serta upaya penanggulangannya, menggunakan metoda S-P-R dengan tujuan agar analisis yang dibuat memperlihatkan keterkaitan antara berbagai faktor lingkungan dapat disampaikan lebih komperhensif (b) kumpulan data lingkungan hidup dengan 5 parameter kunci (air, udara, lahan dan hutan, pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati).

Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan terputusnya sistem pelaporan berjenjang terutama dari kabupaten/kota ke provinsi. Di lain pihak provinsi berkeberatan jika untuk mendapatkan data lingkungan dari kabupaten/kota harus melalui BPS provinsi yang bersumber dari BPS kabupaten/kota. Pihak

provinsi beralasan bahwa data yang ada di BPS provinsi pada umumnya terlambat setahun. Agar alur data tidak terputus, maka diusulkan alur data seperti terlihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Alur Data MDGs Sektor Lingkungan Hidup

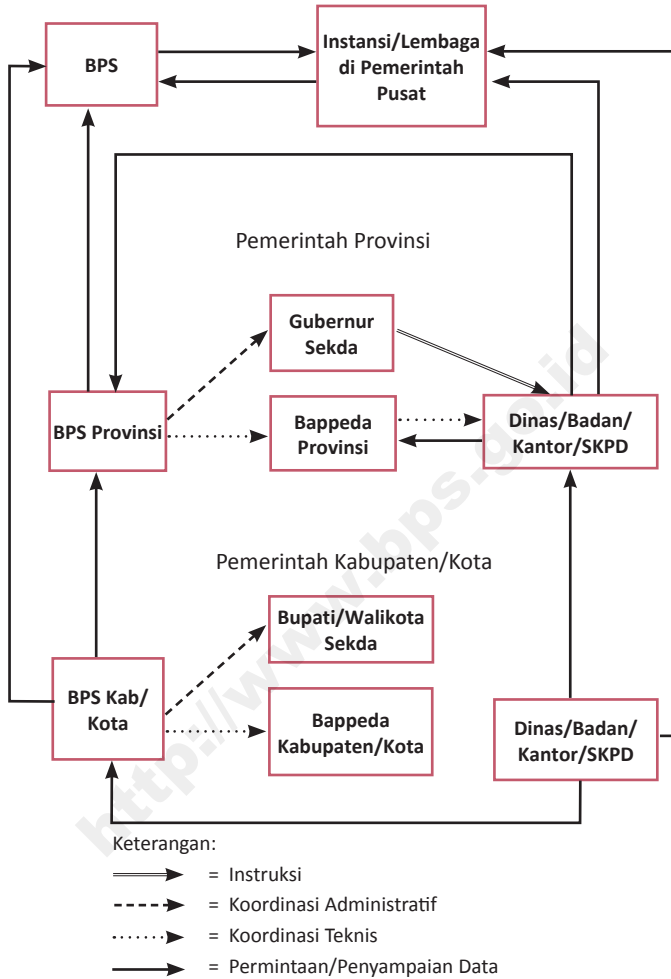


Apakah peranan BPS dalam penataan alur data sektoral?

BPS, selaku instansi vertikal, bertugas melayani kebutuhan data para pengambil kebijakan pembangunan dan masyarakat luas. Untuk dapat mengemban tugas ini BPS mengumpulkan data dengan pendekatan rumah tangga melalui kegiatan sensus dan survei, serta mengumpulkan data sekunder dari instansi sektor, yang di daerah saat ini ditangani oleh SKPD. Dalam kegiatan sensus atau survei, di samping mengumpulkan data dasar seperti ciri-ciri demografi, BPS juga mengumpulkan data untuk kepentingan berbagai sektor pembangunan. Dua jenis pendekatan pengumpulan data yang terkait dengan MDGs disajikan dalam buku ini, yaitu pertama, sistem alur data sensus dan survei penting yang terkait dengan MDGs dan kedua, yaitu pengumpulan data sekunder. Hasil kegiatan yang kedua tersebut dirangkum dalam terbitan yang dinamakan Daerah Dalam Angka (propinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang secara umum disingkat dengan DDA. Di tingkat nasional data sekunder tersebut, bersama-sama dengan data dasar, diterbitkan BPS dalam buku Statistik Indonesia.

Hasil studi menunjukkan adanya ikatan yang erat antara Bappeda, BPS, dan instansi di lingkungan Pemda. Dalam Gambar 17 terlihat bahwa berbagai pihak mengharapkan agar data sektoral dari tingkat kabupaten/kota dikirimkan ke BPS kabupaten/kota. Kemudian baik BPS maupun sektor di kabupaten masing-masing bertanggung jawab meneruskan ke BPS dan pemerintahan pada jenjang di atasnya.

Gambar 17. Sistem Alur Data Sektoral DDA yang Diusulkan



<http://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik

Gedung Badan Pusat Statistik Lantai 2
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10710
Telp.: +62 021 3506647 (direct)
+62 021 3841195, 3842508 ext. 1643 (hunting)
Homepage: <http://mdgs-dev.bps.go.id>
E-mail : bpshq@bps.go.id